

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat

Since Damaryanan^{1*}, Roberth Kurniawan Ruslak Hammar², Mariana Salosso³

^{1,2,3} Universitas Caritas Indonesia, Indonesia

* E-mail: sincedomaryanan8141@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 12-05-2026

Revision: 29-06-2026

Published: 29-06-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.352

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan bahan galian golongan C terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat. Pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal diterapkan menggunakan data campuran primer dan sekunder. Responden berjumlah 35 pegawai BAPENDA Provinsi Papua Barat yang dipilih melalui teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert 1–5 dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi PAD ($\beta=0,588$; $t=5,777$; $p<0,05$); pengelolaan galian C juga berpengaruh positif dan signifikan ($\beta=0,266$; $t=2,808$; $p<0,05$); dan secara simultan keduanya berpengaruh signifikan ($F=26,883$; $p<0,05$; $R^2=0,627$). Optimalisasi PAD Papua Barat memerlukan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak serta penguatan tata kelola penambangan dan retribusi galian C secara sistematis.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Galian Golongan C; Optimalisasi PAD; Papua Barat; Regresi Linear Berganda

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of taxpayer compliance and management of Class C minerals on the optimization of Regional Own Revenue (PAD) of West Papua Province. A quantitative approach with a causal associative design was applied using mixed primary and secondary data. Respondents consisted of 35 employees of BAPENDA West Papua Province selected through saturated sampling. Data were collected using Likert-scale questionnaires and analyzed using multiple linear regression. Results indicate that taxpayer compliance has a positive and significant effect on PAD optimization ($\beta=0.588$; $t=5.777$; $p<0.05$); Class C mineral management also has a positive and significant effect ($\beta=0.266$; $t=2.808$; $p<0.05$); and simultaneously both variables significantly influence PAD optimization ($F=26.883$; $p<0.05$; $R^2=0.627$). Optimizing PAD in West Papua Province requires improving voluntary taxpayer compliance and strengthening governance of Class C mining and levies systematically.

Key word: Taxpayer Compliance; Class C Minerals; PAD Optimization; West Papua; Multiple Linear Regression

Acknowledgment

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan paling nyata dari kemandirian fiskal suatu daerah otonom. Dalam konteks Provinsi Papua Barat, upaya mengoptimalkan PAD menghadapi tantangan struktural yang berlapis: basis pajak yang relatif sempit, kapasitas administrasi perpajakan yang belum merata hingga ke kabupaten/kota, serta pengelolaan sumber daya alam khususnya bahan galian golongan C yang belum sepenuhnya tertata secara sistematis. Data BAPENDA Provinsi Papua Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi PAD masih fluktuatif dan belum secara konsisten mencapai target APBD, mengindikasikan adanya potensi besar yang belum optimal dipungut.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini tampak jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengamanatkan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara berkelanjutan. Secara khusus, peraturan turunannya memperluas kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi atas sumber daya alam termasuk mineral bukan logam dan batuan (galian golongan C). Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kebocoran yang signifikan akibat penambangan tanpa izin, *underreporting* volume material, dan lemahnya sistem penagihan retribusi.

Dua faktor utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan tata kelola pengelolaan galian C. Kepatuhan wajib pajak menentukan seberapa besar potensi pajak daerah yang berhasil direalisasikan melalui mekanisme sukarela, sementara tata kelola galian C menentukan seberapa optimal retribusi dari sektor pertambangan dapat dipungut dan disetorkan ke kas daerah. Rahayu (2021) menegaskan bahwa kepatuhan sukarela merupakan fondasi sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan. Halim (2016) menambahkan bahwa pengelolaan retribusi galian C yang sistematis melalui pendataan, penetapan tarif, pengawasan, dan penagihan yang terintegrasi merupakan kunci optimalisasi penerimaan dari sektor ini.

Penelitian Wijaya & Pratama (2023) membuktikan pengaruh signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi PAD di Kawasan Timur Indonesia. Kurniawan & Lestari (2024) menemukan pengaruh positif nyata pengelolaan retribusi galian C terhadap PAD di wilayah pertambangan. Namun integrasi kedua faktor tersebut dalam konteks spesifik Papua Barat yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan tata kelola fiskal yang khas belum pernah dikaji, sehingga terdapat celah penelitian yang perlu diisi.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap optimalisasi PAD Provinsi Papua Barat; (2) menganalisis pengaruh pengelolaan galian C terhadap

optimalisasi PAD; dan (3) menganalisis pengaruh simultan keduanya terhadap optimalisasi PAD Provinsi Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Data campuran diterapkan: data primer berupa persepsi pegawai melalui kuesioner, dan data sekunder berupa laporan realisasi PAD sebagai konteks analisis. Penelitian dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Papua Barat.

Populasi adalah seluruh pegawai BAPENDA Provinsi Papua Barat yang terlibat langsung dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi galian C, berjumlah 35 orang. Seluruh populasi dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh (sensus) sesuai rekomendasi Sugiyono (2019). Rincian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Bidang/Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Dijadikan Sampel
1	Bidang Pajak Daerah	15	15
2	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	12	12
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD	8	8
	Total	35	35

Sumber: BAPENDA Provinsi Papua Barat, 2026

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner berskala Likert 1–5, terdiri dari 8 item untuk X1 (Kepatuhan WP, mengacu Rahayu, 2021), 8 item untuk X2 (Pengelolaan Galian C, mengacu Halim, 2016), dan 8 item untuk Y (Optimalisasi PAD, mengacu Halim, 2016; Mardiasmo, 2019). Uji validitas menggunakan Pearson Product Moment ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}=0.334$; $df=33$; $\alpha=5\%$) dan reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha ($> 0,60$). Analisis data: uji asumsi klasik (normalitas K-S, multikolinearitas VIF, heteroskedastisitas Glejser, autokorelasi Durbin-Watson) dan regresi linear berganda $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, diproses dengan IBM SPSS Statistics 26.

Hipotesis

H1: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi PAD Provinsi Papua Barat.

H2: Pengelolaan bahan galian golongan C berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi PAD Provinsi Papua Barat.

H3: Kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan galian C secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi PAD Provinsi Papua Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BAPENDA Provinsi Papua Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, meliputi perencanaan, pengendalian, pemungutan, dan pelaporan PAD. Dalam struktur keuangan Papua Barat, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif terbatas dibandingkan Dana Transfer pusat, sehingga upaya optimalisasinya menjadi agenda strategis dalam rangka peningkatan kemandirian fiskal daerah. Sektor galian C menjadi salah satu komponen retribusi berpotensi besar namun belum teroptimalkan secara penuh akibat tantangan tata kelola di wilayah yang tersebar dengan aksesibilitas terbatas.

Karakteristik Responden

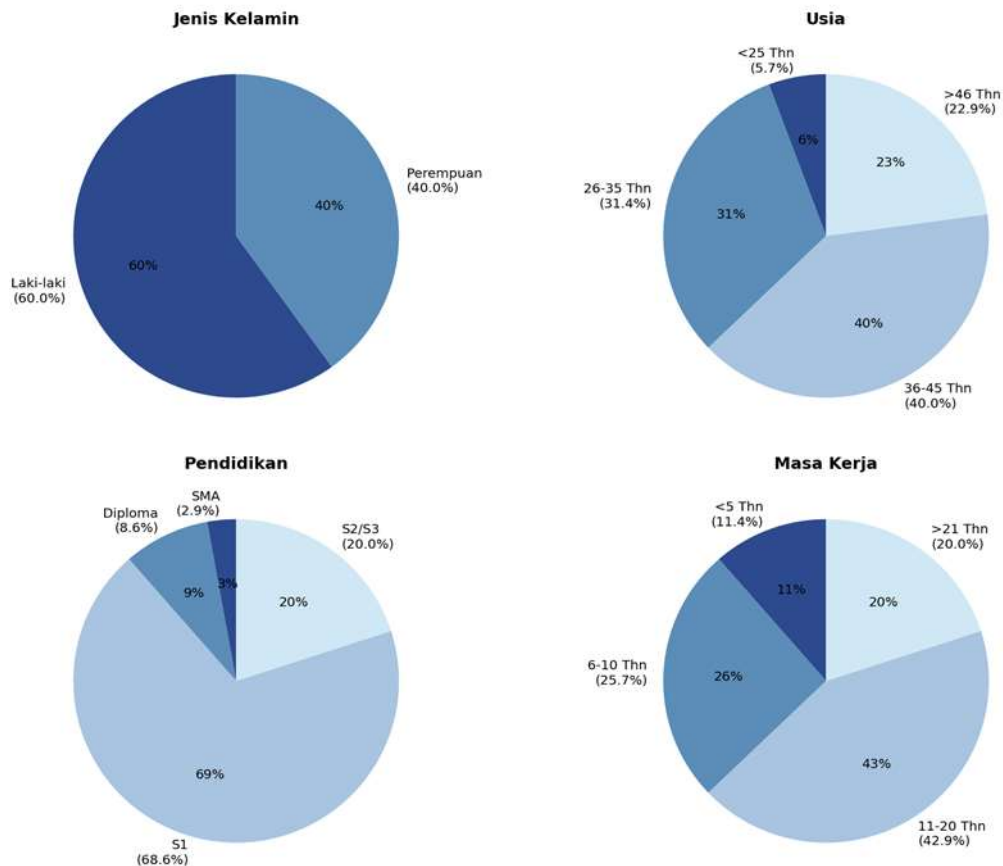
Seluruh 35 pegawai BAPENDA Provinsi Papua Barat berpartisipasi sebagai responden. Profil karakteristik disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No.	Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	21	60.0
		Perempuan	14	40.0
2	Usia	< 25 Tahun	2	5.7
		26 – 35 Tahun	11	31.4
		36 – 45 Tahun	14	40.0
		≥ 46 Tahun	8	22.9
3	Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	1	2.9
		Diploma (D1/D2/D3)	3	8.6
		Sarjana (S1)	24	68.6
		Pascasarjana (S2/S3)	7	20.0
4	Masa Kerja	< 5 Tahun	4	11.4
		6 – 10 Tahun	9	25.7
		11 – 20 Tahun	15	42.9
		> 21 Tahun	7	20.0

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Karakteristik Responden



Gambar 1. Karakteristik Responden

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (60,0%), berusia 36–45 tahun (40,0%), berpendidikan S1 (68,6%), dan masa kerja 11–20 tahun (42,9%). Tingginya proporsi lulusan S1 dan pascasarjana (88,6%) serta pengalaman kerja yang matang mencerminkan kapasitas intelektual dan profesional yang memadai untuk mengelola kompleksitas administrasi pajak dan retribusi daerah.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh 24 item pernyataan dinyatakan valid ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}=0.334$; $df=33$; $\alpha=5\%$) dan ketiga instrumen dinyatakan reliabel (Cronbach's Alpha masing-masing 0.851, 0.864, dan 0.873 seluruhnya $> 0,60$). Rekapitulasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Item	r-Hitung	r-Tabel	Ket.	Cronbach α	Ket.
Kepatuhan WP (X1)	X1.1	0.712	0.334	Valid	0.851	Reliabel
	X1.2	0.734	0.334	Valid		
	X1.3	0.681	0.334	Valid		

Variabel	Item	r-Hitung	r-Tabel	Ket.	Cronbach α	Ket.
Pengelolaan Galian C (X2)	X1.4	0.653	0.334	Valid	0.864	Reliabel
	X1.5	0.698	0.334	Valid		
	X1.6	0.719	0.334	Valid		
	X1.7	0.644	0.334	Valid		
	X1.8	0.671	0.334	Valid		
	X2.1	0.723	0.334	Valid		
	X2.2	0.694	0.334	Valid		
	X2.3	0.708	0.334	Valid		
	X2.4	0.661	0.334	Valid		
	X2.5	0.639	0.334	Valid		
Optimalisasi PAD (Y)	X2.6	0.683	0.334	Valid	0.873	Reliabel
	X2.7	0.717	0.334	Valid		
	X2.8	0.648	0.334	Valid		
	Y.1	0.731	0.334	Valid		
	Y.2	0.748	0.334	Valid		
	Y.3	0.703	0.334	Valid		
	Y.4	0.668	0.334	Valid		
	Y.5	0.724	0.334	Valid		
	Y.6	0.756	0.334	Valid		
	Y.7	0.686	0.334	Valid		
	Y.8	0.712	0.334	Valid		

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Analisis Deskriptif Variabel

Kategori penilaian: 1,00–1,79 (Sangat Rendah), 1,80–2,59 (Rendah), 2,60–3,39 (Cukup), 3,40–4,19 (Baik), 4,20–5,00 (Sangat Baik).

Tabel 4. Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1)

No.	Indikator	Pernyataan	Mean
1	Pemahaman Peraturan Pajak	Saya memahami dengan baik peraturan perpajakan daerah yang berlaku di Provinsi Papua Barat.	4.18
2		Saya dapat menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak daerah kepada pihak yang memerlukan informasi.	4.27
3	Ketepatan Pembayaran Pajak	Wajib pajak yang saya kelola selalu membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan.	4.06
4		Pembayaran pajak dilakukan secara penuh sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam ketentuan pajak.	3.91
5	Pelaporan SPT Tepat Waktu	Saya selalu memastikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dilakukan sebelum batas waktu yang	4.12

No.	Indikator	Pernyataan	Mean
6		ditentukan. Dokumen pelaporan pajak yang disampaikan selalu lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.	4.13
7	Kesadaran Membayar Pajak	Wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa perlu adanya paksaan.	3.84
8		Kepatuhan membayar pajak dipandang sebagai bentuk partisipasi nyata dalam mendukung pembangunan daerah.	3.99
	Rata-rata Variabel X1		4.05

Sumber: Data Primer diolah SPSS, 2026

Rata-rata skor kepatuhan wajib pajak 4,05 (Baik). Item tertinggi X1.2 (Kemampuan menjelaskan hak dan kewajiban WP, mean=4,27) mencerminkan pemahaman teknis aparat yang solid. Item terendah X1.7 (Kesadaran sukarela membayar pajak, mean=3,84) menunjukkan bahwa aspek voluntary compliance masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui sosialisasi berbasis komunitas dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak.

Tabel 5. Deskriptif Variabel Pengelolaan Galian C (X2)

No.	Indikator	Pernyataan	Mean
1	Pendataan Potensi Galian C	Instansi melakukan inventarisasi dan pendataan lokasi penambangan galian golongan C secara menyeluruh dan berkala.	4.05
2		Data potensi galian C yang tersedia akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penetapan target retribusi.	3.90
3	Penetapan Tarif Retribusi	Tarif retribusi galian C ditetapkan secara transparan berdasarkan regulasi yang berlaku dan potensi lapangan.	3.96
4		Penetapan tarif retribusi mencerminkan keadilan dan proporsionalitas dengan volume material yang ditambang.	3.81
5	Pengawasan Penambangan	Instansi melakukan pengawasan lapangan secara rutin untuk memastikan kegiatan penambangan sesuai izin yang diberikan.	3.70
6		Pelanggaran penambangan ilegal ditindak secara tegas sehingga mengurangi kebocoran potensi retribusi daerah.	3.87
7	Penagihan Retribusi	Proses penagihan retribusi galian C dilakukan secara konsisten terhadap seluruh pelaku usaha penambangan terdaftar.	3.93
8		Tingkat keberhasilan penagihan retribusi galian C memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.	3.74
	Rata-rata Variabel X2		3.99

Sumber: Data Primer diolah SPSS, 2026

Pengelolaan galian C memperoleh rata-rata 3,99 (Baik). Item terendah adalah X2.5 (Pengawasan lapangan rutin, mean=3,70) dan X2.8 (Ketercapaian penagihan retribusi, mean=3,74). Kedua item ini secara langsung berkaitan dengan kebocoran retribusi: lemahnya pengawasan lapangan membuka ruang

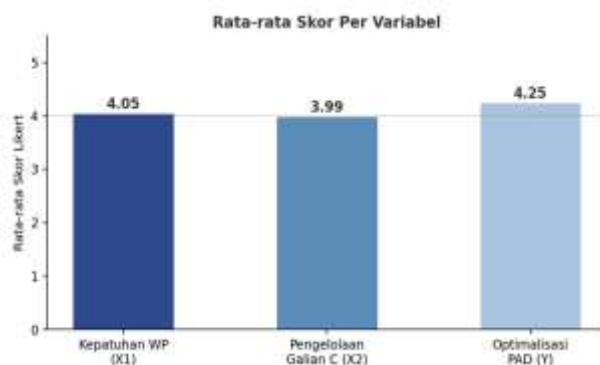
bagi penambangan ilegal, sementara rendahnya ketercapaian penagihan mencerminkan gap antara potensi retribusi yang teridentifikasi dan yang berhasil direalisasikan.

Tabel 6. Deskriptif Variabel Optimalisasi PAD (Y)

No.	Indikator	Pernyataan	Mean
1	Peningkatan Realisasi PAD	Realisasi PAD Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sesuai target yang ditetapkan.	4.14
2		Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap total PAD terus menunjukkan tren yang positif.	4.23
3	Efektivitas Pemungutan	Mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah berjalan efektif dan tidak memberatkan wajib pajak.	4.10
4		Tingkat efektivitas pemungutan PAD sudah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh Kemendagri.	3.98
5	Efisiensi Pengelolaan	Biaya operasional pemungutan PAD proporsional terhadap jumlah pendapatan yang berhasil dikumpulkan.	4.22
6		Pengelolaan administrasi PAD dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang tersedia.	4.32
7	Ketercapaian Target PAD	Realisasi PAD secara keseluruhan telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam APBD setiap tahun.	4.12
8		Instansi mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang belum tergali secara maksimal.	4.18
Rata-rata Variabel Y			4.25

Sumber: Data Primer diolah SPSS, 2026

Optimalisasi PAD memperoleh rata-rata 4,25 (Sangat Baik). Item tertinggi Y.6 (Efisiensi administrasi PAD berbasis TI, mean=4,32) mencerminkan kemajuan digitalisasi yang sudah terasa. Item terendah Y.4 (Kesesuaian dengan standar Kemendagri, mean=3,98) mengindikasikan masih adanya gap antara kinerja riil dan standar nasional pemungutan PAD.



Gambar 2. Rata-rata Skor Per Variabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2026



Gambar 3. Rata-rata Skor Per Item Pernyataan

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik disajikan pada Tabel 7.

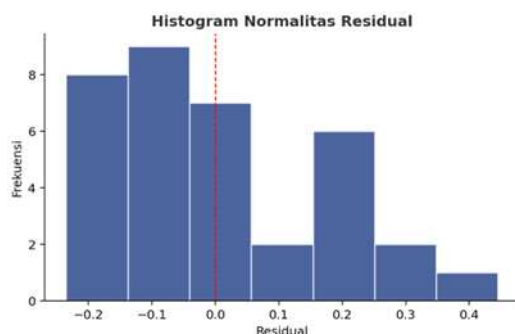
Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

No.	Uji Asumsi	Statistik	Nilai	Syarat	Kesimpulan
1	Normalitas (K-S)	Asymp. Sig.	0.714	$> 0,05$	Normal
2	Multikolinearitas	VIF (X1)	1.318	< 10	Bebas MC
		VIF (X2)	1.318	< 10	Bebas MC
		Tolerance (X1&X2)	0.759	$> 0,10$	Bebas MC
3	Heteroskedastisitas (Glejser)	Sig. X1	0.394	$> 0,05$	Bebas HS
		Sig. X2	0.427	$> 0,05$	Bebas HS
4	Autokorelasi (Durbin-Watson)	D-W	1.964	$dU < d < 4 - dU$	Bebas AC

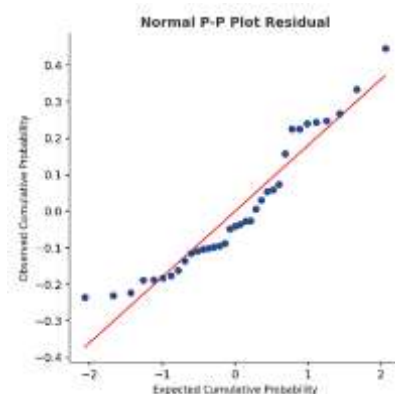
Sumber: Data Primer diolah SPSS, 2026

Uji Kolmogorov-Smirnov: Asymp. Sig. $0.714 > 0,05 \rightarrow$ residual normal. VIF $1.318 < 10$ dan Tolerance $0.759 > 0,10 \rightarrow$ bebas multikolinearitas. Glejser: sig. $X1=0.394$ dan $X2=0.427$, keduanya $> 0,05 \rightarrow$ bebas heteroskedastisitas. Durbin-Watson 1.964 berada di zona bebas autokorelasi ($n=35$, $k=2$; $dU=1,584$; rentang $1,584 < 1,964 < 2,416$). Seluruh asumsi klasik terpenuhi sehingga model regresi dapat diinterpretasikan secara valid.

a

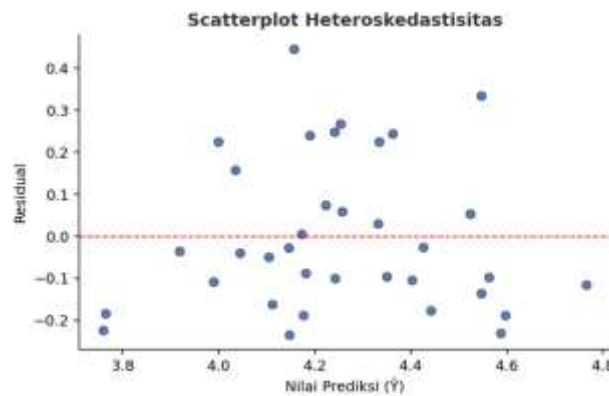


b



Gambar 4. (a) Histogram Normalitas Residual; (b) Normal P-P Plot Residual

Sumber: Data Primer Diolah, 2026



Gambar 5. Scatterplot Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	B (Koefisien)	Std. Error	t-Hitung	Sig.
Konstanta (a)	0.812	0.48	1.691	0.101
Kepatuhan WP (X1)	0.588	0.102	5.777	0,000
Pengelolaan Galian C (X2)	0.266	0.095	2.808	0,008

Sumber: Data Primer diolah SPSS, 2026

Persamaan regresi: $Y = 0.812 + 0.588X_1 + 0.266X_2$. Konstanta 0.812 menunjukkan nilai dasar optimalisasi PAD tanpa kontribusi kedua prediktor. Koefisien $X_1=0.588$: setiap peningkatan satu satuan skor kepatuhan WP akan meningkatkan optimalisasi PAD sebesar 0.588 satuan (ceteris paribus). Koefisien $X_2=0.266$: setiap peningkatan satu satuan skor pengelolaan galian C meningkatkan PAD sebesar 0.266 satuan. Kepatuhan WP (X_1) memiliki koefisien lebih besar, menandakan pengaruhnya yang lebih dominan pada konteks Provinsi Papua Barat.

Koefisien Determinasi dan Uji F

Tabel 9. Koefisien Determinasi (R^2) dan Uji F

R	R^2	R^2 Adj.	F-Hitung	F-Tabel	Sig.	Ket.
0.792	0.627	0.604	26.883	3.295	0,000	Signifikan

Sumber: Data Primer diolah SPSS, 2026

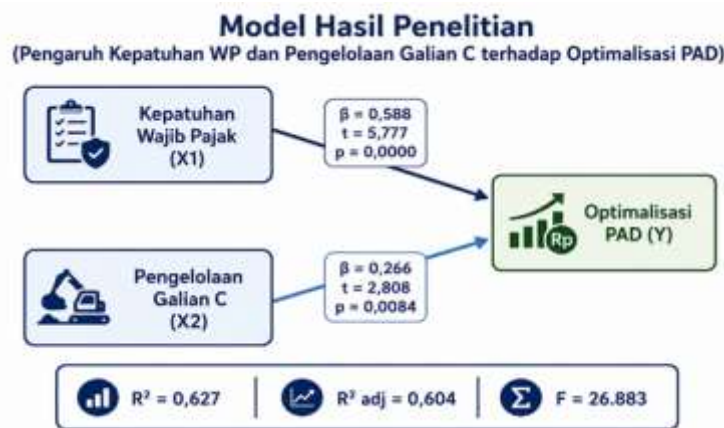
$R^2=0.627$ menunjukkan bahwa 62,7% variasi optimalisasi PAD Provinsi Papua Barat dapat dijelaskan oleh kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan galian C secara bersama-sama. Sisanya 37,3% dipengaruhi variabel lain di luar model (kualitas pelayanan aparat, sanksi, kondisi ekonomi daerah, kapasitas anggaran pemungutan). F-hitung $26.883 > F\text{-tabel } 3.295$ ($df_1=2$, $df_2=32$; $\alpha=5\%$) dengan $\text{sig.}=0,000$ membuktikan model layak dan kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi PAD.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tabel 10. Rekapitulasi Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Variabel	t/F Hitung	t/F Tabel	Sig.	Keputusan
H1	Kepatuhan WP (X1) → PAD (Y)	5.777	2.037	0,000	H1 Diterima
H2	Pengelolaan Galian C (X2) → PAD (Y)	2.808	2.037	0,008	H2 Diterima
H3	X1 & X2 (Simultan) → PAD (Y)	F=26.883	F=3.295	0,000	H3 Diterima

Sumber: Data Primer diolah SPSS, 2026



Gambar 6. Model Hasil Penelitian

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Pembahasan

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Optimalisasi PAD (H1)

Hipotesis pertama diterima: kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi PAD ($t=5.777 > t\text{-tabel}=2.037$; $\text{sig.}=0,000$; $\beta=0.588$). Pengaruh ini adalah yang paling dominan dalam model, mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak memberikan dampak langsung dan substansial pada penerimaan PAD. Dimensi pemahaman peraturan pajak memperoleh skor tertinggi ($\text{mean}=4,27$), mencerminkan kapasitas teknis aparat yang solid. Dimensi kesadaran sukarela membayar pajak ($\text{mean}=3,84$) menjadi titik paling lemah justru dimensi yang paling menentukan keberlanjutan penerimaan PAD jangka panjang karena tidak bergantung pada paksaan administratif.

Rahayu (2021) menegaskan bahwa voluntary compliance merupakan fondasi sistem perpajakan yang berkelanjutan karena mengurangi biaya penegakan. Mardiasmo (2019) menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan secara langsung meningkatkan efektivitas pemungutan PAD. Wijaya & Pratama (2023) membuktikan korelasi positif signifikan antara tingkat kepatuhan dan realisasi PAD di wilayah dengan karakteristik sosio-ekonomi yang heterogen seperti Papua Barat. Priantara (2022) menambah-

kan bahwa transparansi penggunaan PAD untuk layanan publik merupakan katalis paling efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela jangka panjang. Implikasi manajerial: BAPENDA perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya pada program sosialisasi perpajakan berbasis komunitas, digitalisasi layanan pembayaran, dan komunikasi publik tentang dampak nyata PAD terhadap pembangunan daerah.

Pengaruh Pengelolaan Galian C terhadap Optimalisasi PAD (H2)

Hipotesis kedua diterima: pengelolaan galian C berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi PAD ($t=2.808 > t\text{-tabel}=2.037$; $\text{sig.}=0,008$; $\beta=0.266$). Meskipun koefisiennya lebih kecil dari X_1 , pengaruh ini tetap signifikan dan bermakna secara kebijakan mengingat potensi retribusi galian C yang sangat besar di Papua Barat. Pengawasan lapangan ($\text{mean}=3,70$) dan ketercapaian penagihan ($\text{mean}=3,74$) menjadi dua titik lemah paling kritis: lemahnya pengawasan membuka ruang penambangan ilegal, sementara rendahnya penagihan mencerminkan gap besar antara potensi yang teridentifikasi dan yang berhasil dipungut.

Halim (2016) menegaskan bahwa pengawasan penambangan yang lemah merupakan faktor utama kebocoran retribusi galian C karena PETI (Penambangan Tanpa Izin) tidak membayar kewajiban retribusi. Kurniawan & Lestari (2024) menemukan peningkatan retribusi galian C hingga 35% dalam dua tahun setelah implementasi sistem e-monitoring dan penagihan digital. Priantara (2022) menambahkan bahwa penetapan tarif yang transparan dan adil adalah prasyarat kepatuhan sukarela pelaku usaha tambang. Implikasi kebijakan: pembentukan tim inspeksi terpadu lintas instansi (BAPENDA, Dinas ESDM, Satpol PP), integrasi data perizinan tambang dengan sistem retribusi berbasis geospasial, dan penerapan e-billing retribusi galian C perlu menjadi prioritas program kerja BAPENDA.

Pengaruh Simultan terhadap Optimalisasi PAD (H3)

Hipotesis ketiga diterima: kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan galian C secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi PAD ($F=26.883 > F\text{-tabel}=3.295$; $\text{sig.}=0,000$; $R^2=0.627$). Nilai 62,7% kontribusi kedua variabel menegaskan kerangka analisis ini cukup kuat sebagai dasar kebijakan fiskal daerah. Kedua variabel bersifat komplementer: kepatuhan WP memastikan penerimaan dari sektor pajak berjalan optimal melalui mekanisme sukarela, sementara pengelolaan galian C mengoptimalkan retribusi dari keunggulan komparatif sumber daya alam Papua Barat. Sinergi keduanya menghasilkan efek gabungan yang lebih kuat dibandingkan intervensi parsial pada salah satu sisi.

Sisa 37,3% yang tidak dijelaskan model membuka peluang penelitian lanjutan dengan variabel kualitas pelayanan aparat pajak, efektivitas sanksi, atau alokasi anggaran pemungutan. Wijaya & Pratama (2023) dan Kurniawan & Lestari (2024) secara konsisten menunjukkan bahwa pendekatan

terpadu memperkuat kepatuhan sekaligus menutup kebocoran dari sumber retribusi lokal menghasilkan dampak fiskal yang paling signifikan. Agenda kebijakan terpadu yang direkomendasikan: (1) reformasi digital administrasi perpajakan daerah; (2) penguatan pengawasan tambang galian C berbasis teknologi; dan (3) sistem insentif bagi wajib pajak patuh sebagai katalis kepatuhan sukarela jangka panjang.

SIMPULAN

Tiga kesimpulan utama: (1) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi PAD Provinsi Papua Barat ($\beta=0.588$; $t=5.777$; $\text{sig.}=0,000$), merupakan prediktor paling dominan. (2) Pengelolaan bahan galian golongan C berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi PAD ($\beta=0.266$; $t=2.808$; $\text{sig.}=0,008$). (3) Secara simultan keduanya berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi PAD ($F=26.883$; $\text{sig.}=0,000$; $R^2=0.627$), artinya 62,7% variasi optimalisasi PAD dijelaskan oleh kedua variabel tersebut.

Pertama, BAPENDA Provinsi Papua Barat perlu mengintensifkan program edukasi perpajakan berbasis komunitas dan memperkuat transparansi penggunaan PAD untuk mendorong kepatuhan sukarela. Digitalisasi layanan pembayaran pajak daerah perlu diperluas ke seluruh kabupaten/kota. Kedua, penguatan pengawasan penambangan galian C melalui tim inspeksi terpadu dan sistem monitoring geospasial perlu segera diimplementasikan, disertai penerapan e-billing retribusi untuk menutup kebocoran penerimaan. Ketiga, penelitian lanjutan disarankan memasukkan variabel kualitas pelayanan aparat, efektivitas sanksi, atau kondisi ekonomi daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang determinan optimalisasi PAD Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, & Mayangsari, S. . (2026). Persepsi dan Kepatuhan UMKM Pakaian Terhadap Kebijakan PPh Final di Tanah Abang . JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 3(4), 495–505. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.244>
- Aryono, M. D., & Arya Wiguna, I. N. . (2025). Analisis Implementasi Pemindahbukuan pada Layanan e-PBK terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai di Instansi Pengelola Pajak . JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 3(2), 77–88. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.147>
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Farhan, R., Agustawan, & Ahyaruddin, M. . . (2025). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 3(2), 118–153. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.166>
- Fitriyanti, N., & Mayangsari, S. . (2026). Mandatory but Not Fully Accepted? : Evaluasi Implementasi Coretax pada Perusahaan Induk Menggunakan Technology Acceptance Model. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 3(4), 761–775.

<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.276>

- Gayatri, N. P. ., Dewi, D. M. I. C., Arisanti, N. K. A., & Astuti, P. D. (2026). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce: Peran Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467–479. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.229>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN.
- Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P. S., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175>
- Kurniawan, A., & Lestari, D. (2024). Pengaruh Pengelolaan Retribusi Galian C terhadap Peningkatan PAD di Wilayah Pertambangan Kalimantan. *Jurnal Keuangan Daerah*, 12(1), 45–62.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi Terbaru). Andi.
- Nurmantu, S. (2020). Pengantar Perpajakan. Granit.
- Olivia, O., Lesi Hartati, & Aris Munandar. (2026). Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 328–340. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.208>
- Perdana, S., Hariyanto, A., & Umamy, E. (2026). Interpretasi Regulasi Perpajakan Pasca Transformasi Sistem Administrasi Pajak dalam Praktik Akuntansi pada BPR. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 386–397. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.212>
- Priantara, D. (2022). Perpajakan Indonesia: Teori dan Praktik. Mitra Wacana Media.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Literasi Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(1), 36–47. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i1.144>
- Rahayu, S. K. (2021). Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi. Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Widhiyanto, M., Suryani, & Lubis, I. (2026). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit, dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 413–423. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.215>
- Wijaya, R., & Pratama, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak dan Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 112–129.